

PROFIL ORGANISASI
KOMITE PEMANTAU LEGISLATIF (KOPEL) MAKASSAR¹
Kantor Cabang Makassar : Jl. Batua Raya 9 Nomor 3

A. Latar Belakang Berdirinya KOPEL Makassar

KOPEL Makassar adalah organisasi Non Government Organization (NGO) yang dibentuk oleh KOPEL Indonesia untuk menjalankan program lembaga dalam wilayah Kota Makassar dengan terdaftar pada Kesbang Kota Makassar dengan **Nomor 220/2428-II/BKBP/XI/2019** KOPEL Indonesia sendiri merupakan lembaga Non Government Organization (NGO) yang didirikan) didirikan pada tanggal 10 Maret 2000 yang berkedudukan di Kota Makassar berdasarkan dengan Akte Notaris Widartiningsih Nomor 13 tertanggal 29 Mei 2000 yang selanjutnya diperbaharui dengan Badan Hukum Yayasan dengan nama “Yayasan Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia” pada notaris yang sama dengan Nomor: 18 tertanggal 23 Mei 2019. Terdaftar di Kementerian Dalam Negeri - RI pada Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor: 194/D.III.3/VIII/2009 dengan beberapa kali perpanjangan terakhir dengan nomor: 01-00-00/095/D.IV.1/XI/2015 tertanggal 16 November 2015.

KOPEL Makassar dibentuk sejak tahun 2000 oleh pengurus KOPEL Sulawesi (sekarang Yayasan KOPEL Indonesia) untuk ruang lingkup program dalam wilayah hukum Kota Makassar. Berbagai kebijakan Pemerintah Kota Makassar membutuhkan banyak respon dari masyarakat sipil sebagai penyeimbang dalam setiap kebijakan pemerintah bersama dengan DPRD terutama setelah UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana DPRD menjadi bagian dari Pemerintahan Daerah.

B. Visi Misi

Sebagai Lembaga Otonom dari KOPEL Indonesia, KOPEL Makassar dalam menjalankan aktifitas tetap berpedoman pada pencapaian Visi Misi KOPEL Indonesia.

C. Manajemen dan Struktur Organisasi

KOPEL Makassar sebagai lembaga/organisasi Otonom KOPEL Indonesia memiliki struktur dan kebijakan sendiri sehingga manajemen organisasinya menyesuaikan diri dengan kelompok sasaran advokasi. Seiring dengan perubahan manajemen lembaga dengan Badan Hukum Yayasan sesuai dengan Akta Nomor: 18 tertanggal 23 Mei 2019, pada tataran manajemen organisasi saat ini, KOPEL Makassar memiliki struktur berdasarkan surat keputusan No. 001/A/SK/KOPEL/VIII/2019 tentang pengangkatan Pengurus Harian KOPEL Makassar Tahun 2019 – 2023 sebagai berikut :

Direktur : Ahmad Tang
Sekretaris : Nurlianti
Bendahara : Zhari
Staf : - Syahrul
- Amirullah
- Agung Dwi Eka Hidayat

Dari segi struktural dan SDM yang ada, KOPEL Makassar tetap mengacu pada kerja-kerja rutin yang selama ini dilakukan oleh KOPEL Indonesia namun isunya tetap berbasis pada isu daerah yang menjadi dampingan atau tempat domisili KOPEL Makassar berada, antara lain Penguatan dan Pemantauan Kinerja DPRD Kota Makassar, advokasi Pelayanan Publik, penguatan dan pendampingan masyarakat sipil (Parlemen Group) dan riset-riset kebijakan daerah.

Pemantauan Kinerja DPRD Kota Makassar dan pendampingan Parlemen Grup bagi masyarakat dampingan yang diterjemahkan sebagai bagian dari strategi atau ideologi gerakan yang sebenarnya berkeinginan menarik relasi dan komunikasi politik yang kuat dari lembaga parlemen dengan masyarakat sipil atau konstituennya. Begitu pula sebaliknya, untuk mendorong masyarakat sipil agar lebih peduli dan aktif membangun komunikasi sekaligus kontrol terhadap wakilnya di parlemen.

Program-program penguatan masyarakat lewat Parlemen Group semangatnya adalah bagaimana menerjemahkan parlemen baik secara institusional maupun sebagai individu pemegang mandat rakyat yang seharusnya lebih dekat dengan suara batin dan emosional masyarakatnya. Dalam artian komunikasi politik antara masyarakat sebagai pihak yang diwakili dengan anggota parlemen sebagai pihak yang diwakili. Untuk komunikasi tersebut, KOPEL Makassar berperan sebagai intermediary antara keduanya.

D. Mitra Kerja Sama Lembaga

Semenjak dibentuknya, KOPEL Makassar telah membangun kerjasama program dengan berbagai lembaga, masing-masing:

- DPRD Kota Makassar
- Pemerintah Kota Makassar
- Ombudsman Kota Makassar
- Sekjend Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI
- Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi (YAPPIKA)
- Koalisi Kebijakan Partisipatif (KKP)
- Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3)
- Komisi Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunai Darussalam
- Partnership/Kemitraan Jakarta
- International Republican Institut (IRI)
- Yayasan TIFA
- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK)
- FOINI
- Indonesia Parliament Centre (IPC)
- Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi)
- Kinerja – USAID
- LeIP - Elsam
- Article 33

E. Pengalaman Pelaksanaan Program Kerja Sama Lembaga

Pengalaman pelaksanaan program kerja sama lembaga oleh KOPEL Makassar telah banyak dilakukan baik sebagai inisiatif sebagai lembaga otonom maupun pelimpahan program dari KOPEL Indonesia, Beberapa program kerja yang telah dilaksanakan, antara lain:

PROGRAM & MITRA KERJA Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Makassar

TAHUN	NAMA PROGRAM KEGIATAN	MITRA PENDANAAN
2001 - Sekarang	Publik Hearing RAPBD Kota Makassar	Swadaya lembaga
Januari – Juni 2002	Responsibility DPRD terhadap dampak korupsi kepada masyarakat miskin	Partnership dan UNDP
2002	Publik Hearing RAPBD 2002 Kota Makassar	Swadaya lembaga
2003 – 2004	Penguatan pemilih kritis: Mendorong masyarakat tani dan nelayan menjadi pemilih kritis sebagai hak keterwakilan dalam PEMILU 2004	Partnership dan UNDP
2004	Publik Hearing RAPBD 2004 Kota Makassar	Swadaya lembaga
28 – 29 April 2005	Konstituen meeting DPD: Mempertemukan kepentingan daerah dengan keterbatasan wewenang DPD	YAPPIKA
Agustus 2004	Advokasi Tatib DPRD Makassar dalam rangka pembentukan Badan Kehormatan	KKP (Koalisi Kebijakan Partisipatif) – YAPPIKA
28 Februari 2005	Advokasi PERDA No. 5 tahun 2004 tentang penyertaan Modal PT. CAS	KKP (Koalisi Kebijakan Partisipatif) – YAPPIKA
Desember 2005	Seminar penguatan kelembagaan DPD – RI	Sekjen DPD – RI
2 Agustus 2007	FGD Peran Ideal DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia	Sekjen DPD – RI
15 Mei – 15 September 2008	Pembentukan Komisi Ombudsman Lokal Kota Makassar	Partnership
15 September – 15 November 2008	Development of A Public Oversight Mechanism for Temporary Legislative Candidates List (DCS) for the City Council of Makassar and Gowa in South Sulawesi	Partnership
Januari – April	Political Party Accountability And	International

2009	Constituent Outreach Program	Republican Institute (IRI) -USAID
26 - 28 Juli 2009	Training on Capacity Building for Woman Elected Legislator Candidate	International Republican Institute (IRI) -USAID
Juni - Agustus 2009	Political Party Accountability And Constituent Outreach Program	International Republican Institute (IRI)-USAID
20 Agustus 2009	Seminar Membedah carut marut daftar pemilih Pileg dan Pilpres 2009	Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI)
Juli 2009 - Juni 2010	Program peningkatan fungsi pengawasan komisi-komisi DPRD Kota Makassar melalui advokasi anggaran oleh Kelompok Masyarakat Sipil terhadap pelaksanaan DAK Pendidikan	Yayasan TIFA
Desember 2010 - November 2012	Consolidation of Civil Society in Monitoring The Accountability of Local Budget	European Union to Indonesia and Brunei Darussalam
Februari 2011 - Januari 2012	Inisiasi pembentukan forum bersama DPRD Provinsi dan DPRD kab/kota dalam penguatan fungsi pengawasan DAK Pendidikan	TIFA Foundation
Desember 2009 - November 2011	Improvement of Living Conditions of the Poor and Disadvantaged People through Capacity Strengthening of Local Parliaments and Increase Participation of Civil Society in Local Planning and Budgeting	European Union to Indonesia and Brunei Darussalam
Mei - Desember 2011	Political Party Accountability And Constituent Outreach Program	International Republican Institut (IRI)
2012 - 2014	Program Educating and Equipping the Future Justice Reformers	The Asia Foundation-USAID
Juni 2012-Juni 2013	Mendorong Tata Kelola Managemen Puskesmas yang transparan, partisipatif dan akuntabel dalam menjamin persalinan aman, inisiasi menyusu dini dan ASI Eksklusif	KINERJA-USAID
Agustus 2015 - Januari 2017	Pemantauan Pengadilan Tipikor	LeIP, ELSAM
2017	Jambore Pemuda Sulsel untuk membangun kebersamaan dan toleransi kerja sama Dinas Pemuda dan	Dinas Pemuda dan Olahraga Sulsel

	Olah Raga Sulsel	
Oktober 2018	Fasilitasi Jambore Komunitas Anti Korupsi KOPEL memfasilitasi Jambore Komunitas Anti Korupsi se Indonesi yang dilaksanakan oleh KPK pada tanggal di BP-PAUD Kota Makassar	KPK
Januari - Desember 2019	Assistance to Local Governments to Promote Evidence-Based Policies, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	YAPPIKA - USAID